UPAYA PEMANTAPAN KETAHANAN PANGAN NASIONAL MELALUI REVITALISASI DI SEKTOR PERTANIAN DALAM RANGKA MENGURANGI FENOMENA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN MENJADI KAWASAN INDUSTRI

Siti Syuhada[1]

Absract

The problem of malnutrition was the inability of the community to satisfy their need especially food. Moreover, the community that was in the rural area, they commonly as the farmer. The farmers in Indonesia suppose increase their productivity, but farming which oriented to the market and the improvement of the agricultural system that was based on agricultural technology, so itcould increase their income. If the community could not increase the income, then the role of the government in order to reduce poverty and the unemployment is to increase the activity by revitalized the sector of agriculture, so it will be able to reduce the unemployment. Because, most Indonesian inhabitants are the farmer and it match with geographical condition in Indonesia.

Overseas, many countries that majority of their community as the farmer and could increase their income that was relied on from the sector of agriculture. But the problem of the land change in function could resulting from the policy that was not directed become the phenomenon for the farmer to maintain his life from the sector of agriculture. The farmer is a job that almost some Indonesian communities relied on his life from this sector. Necessarily this sector must be maintained with renovation of agricultural technology. Overseas, their community relied on their life from the sector of agriculture that caused their country could develop. If the matter continued to be developed with the modern agricultural system, then the industrial group will not dare to shift the function of the agricultural land to the industrial region. But the policy of this change in function sometimes the farmer's group always treated as a stepchild by the government compared with the group indistri resulting from interest politics that happened.

If the rice cultivation land already changed, then it will influence the income of the farmer and had a bad impact on national food endurance. Food endurance not only means of the availability of food, but also the capacity to buy food and not the occurrence of the dependence with any side. National food endurance depends on the production of the rice that keeps it increase and not causes the instability of food. The destiny of the rice farmer in Indonesia also will affect many social problems, they will become the unemployment and will become the social problem and protracted economics.

Keywords: rice cultivation, farmers, economy, agriculture

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah. Namun sebagian rakyat cukup besar tergolong miskin. Selama 30 tahun terakhir, Indonesia mencapai berbagai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Bahkan oleh Bank Dunia, Indonesia digolongkan sebagai salah satu bayi ajaib di Asia Tenggara yang mencapai keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Pendapatan rata-rata penduduk meningkat, jumlah orang miskin berkurang dan kesejahteraan penduduk semakin baik. Hal ini terjadi sebelum krisis ekonomi melanda Indonesia di akhir tahun 1997. Dampak dari krisis telah menekan kesejahteraan rakyat, terutama mereka yang sebelum krisis telah hidup di sekitar garis kemiskinan ke bawah.

Salah satu indikator bagaimana terpuruknya tingkat kesejahteraan rakyat adalah terjadinya ancaman terhadap kelangsungan pangan Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sekarang ini baru menghadapi perubahan ekonomi dan politik yang tidak menentu. Walaupun tidak merata, secara umum Bank Dunia melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif sebelum tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada penurunan angka kemiskinan dari 40% tahun 1976 menjadi 11% tahun 1996, penurunan kematian bayi; penurunan kematian anak 0-4 tahun; dan 25% penurunan kematian ibu. Secara statistik hal ini ditunjang pula dengan pencapaian keamanan pangan, dan pencapaian pelayanan kesehatan. Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus merupakan suatu pilar utama hak azazi manusia. Krisis ekonomi memperlambat proses penurunan yang telah terjadi selama tiga dekade terakhir.

Krisis ekonomi berakibat menurunnya nilai rupiah yang berakibat pada merosotnya pendapatan perkapita dan menyebabkan jumlah penduduk miskin semakin meningkat. Dampak krisis ekonomi terhadap kesehatan masyarakat dapat dilihat secara tidak langsung. Disadari

[1] Dosen Jurusan Pendidikan Ilmu Pendidikan Sosial, FKIP Universitas Jambi

secara luas bahwa dampak krisis ekonomi berdampak negatif pada status kesehatan masyarakat, akan tetapi bukti nyata secara statistik masih perlu dikaji agar tidak terjadi kontradiksi. Kenyataannya kajian perubahan morbiditas dan mortalitas pada penduduk masih dilakukan terus menerus. Diperlukan informasi data kesehatan dengan kualitas yang baik dari sistem pelayanan gizi berhubungan dengan makanan dan kesehatan.

Salah satu golongan umur yang rawan akan masalah gizi adalah Balita. Gizi pada Balita sangat penting untuk pertumbuhan dan kecerdasannya, sehingga perlu pemantauan dan pemenuhan gizi yang baik . Masalah gizi kurang, terutama pada anak Balita dikaji kecenderungannya menurut SUSENAS. Banyak sekali terjadi penurunan prevalensi gizi kurang, yang menjadi pusat perhatian adalah penderita gizi buruk pada anak Balita, yang terlihat tidak ada penurunan. Masih tingginya prevalensi gizi kurang pada anak balita berhubungan dengan masih tingginya Bayi Lahir dengan Berat Badan Rendah (BBLR). Akibat dari BBLR dan gizi kurang pada balita berkelanjutan pada masalah pertumbuhan anak usia masuk sekolah.

Selain itu berdampak pada meningkatnya angka pengangguran yang merupakan persoalan yang berhubungan dengan produktifitas tenaga kerja manusia, karena kwalitas pendidikan belum menghasilkan output sumber daya manusia yang baik. Terbukti sebagian besar lulusan dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia belum mampu bersaing dengan output dari luar Indonesia, akhirnya hanya mampu mencetak sarjana yang hanya untuk mendapat gelar dan ijazah dan tidak memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Sekolah-sekolah kejuruan kurang berkembang. Orang merasa lebih bergengsi apabila tamat dari sekolah umum dari pada sekolah kejuruan, karena para siswa sekolah kejuruan dianggap kurang berkemampuan secara intelektual dibandingkan dengan anak-anak sekolah umum. Hasilnya Indonesia tidak cukup memiliki tenaga teknis dan insinyur-insinyur lapisan menengah yang tumbuh dari bawah. Padahal sebagai salah satu negara yang sedang berkembang kebutuhan akan tenaga teknis amat besar. Merekalah yang akan membentuk lapisan tenaga kerja menengah Indonesia dan menjadi infrastruktur lunak bagi pengembangan teknologi lebih canggih pada tahap berikutnya. Dengan demikian kemiskinan yang dialami Indonesia ditengah-tengah kelimpahan sumber daya alamnya antara lain disebabkan oleh sistem pendidikan yang kurang sesuai dengan tahap perkembangan Indonesia.

Masalah tersebut juga dapat dilihat dari lulusan sekolah menengah yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi akibat keterbatasan dana orang tua, juga tidak punya ketrampilan di bidang tertentu. Di sini jumlah lulusan sekolah menengah lebih banyak dari pada siswa dari sekolah kejuruan, padahal jika dana terbatas untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi, maka siswa dapat memilih sekolah kejuruan yang banyak diajarkan berbagai jenis ketrampilan, seperti tata boga, tata busana, mesin, dan sebagainya.

Ada juga yang tidak bisa melanjutkan ke sekolah menengah atau kejuruan akhirnya berhenti untuk tidak melanjutkan pendidikan atau sekolah yang lebih tinggi. Hal ini karena masalah keterbatasan dana yang juga merupakan fenomena besar yang dialami generasi bangsa kita sehingga kita tergolong negara yang memiliki pendidikan dengan tingkat dan kwalitas yang rendah, terbukti banyaknya masyarakat kita yang masih buta huruf apalagi yang tinggal di pelosok nusantara, jauh dari sarana infrastruktur seperti jalan, transportasi yang mahal, komunikasi, dan sebagainya. Padahal anggaran peminjaman dari luar negeri sebagai negara pendonor untuk paket pembangunan tidak sesuai dengan kebutuhan rill masyarakat. Kebijakan fiskal dan moneter juga tidak pro kaum miskin, pengelolaan sumber daya alam juga tidak hati-hati.

Kemudian kita juga memiliki pendapatan perkapita yang rendah, yang dapat meningkatkankan jumlah kemiskinan dan menambah pengangguran, karena tidak cukupnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok terutama kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan akan terpenuhinya pendidikan. Apabila pengangguran meningkat maka angka kriminalitas juga akan meningkat. Upaya untuk memenuhi kebutuhan banyak diperoleh dari hasil merampok, mencuri, mengemis, dan sebagainya. Setelah krisis moneter jumlah pengemis melonjak tajam sejak tahun 1999. Para pengemis ini beroperasi dalam berbagai cara. Banyak yang menjadi pengamen dadakan, penodong di bis kota dan di persimpangan-persimpangan jalan raya, dan lain-lain. Fenomena ini sangat perlu benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan betul oleh pemerintah agar dapat mewujudkan masyarakat yang mampu untuk meningkatkan pendapatan minimal untuk memenuhi kebutuhan akan pangan sehingga dapat mempertahankan hidup

dan menghindari terjadinya angka kematian akibat busung lapar dan kekurangan gizi. Jika manusia tidak terpenuhi tubuhnya akan gizi, maka kemungkinan besar untuk berpikir atau daya pikir juga akan berkurang.

Semua kita tahu bahwa masalah kekurangan gizi adalah ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan terutama pangan. Apalagi masyarakat yang berada di lingkungan pedesaan yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Petani di Indonesia sebenarnya harus meningkatkan produktifitas, tetapi bertani yang berorientasi pada pasar dan perbaikan sistem pertanian yang berdasarkan teknologi pertanian sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Apabila masyarakat tidak mampu meningkatkan pendapatan, maka peran pemerintah dalam rangka mengurangi kemiskinan dan angka pengangguran adalah meningkatkan kegiatan dengan merevitalisasi sektor pertanian sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan sangat cocok dengan kondisi geografis bangsa Indonesia. Di luar negeri banyak juga negara yang masyarakatnya sebagai petani dan mampu meningkatkan pendapatan mereka yang diandalkan dari sektor pertanian. Akan tetapi persoalan alih fungsi lahan akibat kebijakan yang tidak terarah dapat menjadi fenomena bagi petani untuk mempertahankan hidupnya dari sektor pertanian. Petani adalah sebuah pekerjaan yang hampir sebagian masyarakat Indonesia mengandalkan hidupnya dari sektor ini. Seharusnya sektor tersebut harus dipertahankan dengan renovasi teknologi pertanian. Di luar negeri masyarakatnya ada yang mengandalkan hidup dari sektor pertanian yang menyebakan negara mereka bisa maju Apabila hal terus dikembangkan dengan sistem pertanian yang modern, maka kelompok industri tidak akan berani mengalihkan fungsi lahan pertanian menjadi kawasan industri. Tetapi kebijakan alih fungsi tersebut kadang kelompok petani selalu dianaktirikan pemerintah dibandingkan dengan kelompok indistri akibat politik rente yang terjadi.

Masalah tersebut dapat berdampak pada kerawanan pangan nasional karena upaya untuk mempertahankan pangan nasional masih dikatakan kurang terbukti masih juga Indonesia mengimpor beras dari luar negeri. Padahal negara kita terkenal dengan tanah yang subur dan iklim yang tropis. Tanah yang subur sangat cocok untuk mengembangkan areal pertanian khusunya sawah dalam rangka pemenuhan beras dalam negeri.

Apabila lahan persawahan sudah dialihfungsikan, maka akan mempengaruhi pendapatan petani dan berdampak buruk pada ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk membeli pangan dan tidak terjadinya ketergantungan dengan pihak manapun. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung kepada produksi beras yang seharusnya meningkat dan tidak menimbulkan kerawanan pangan. Sedangkan makanan pokok masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh beras. Harga beras naik dan terus naik yang disebabkan oleh menurunnya produksi beras dan meningkatnya permintaan terhadap beras. Operasi pasar beras murah bulog tidak mampu menekan kebijakan harga. Nasib petani padi di Indonesia juga akan dikhawatirkan menimbulkan banyak permasalahan sosial, mereka akan menjadi pengangguran dan akan menjadi masalah sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.

Kemudian kebijakan impor beras yang ditetapkan oleh pemerintah juga akan merugikan para petani, karena beras impor lebih murah harganya. Hal ini juga disebabkan oleh politik beras yang ditetapkan oleh pemerintah dengan memberikan subsidi impor lebih besar dari pada mensubsidi petani. Petani mengeluarkan modal yang sudah besar dalam hal penyediaan pupuk. Petani tak sanggup lagi untuk membeli pupuk karena harga yang semakin meningkat. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah, ketika panen raya harga padi petani mengalami penurunan dan tidak sebanding dengan biaya tanam yang dikeluarkan. Akhirnya banyak lahan pertanian yang ditinggalkan karena petani sudah kekurangan modal. Hal tersebut menarik pihak swasta (pemilik modal) untuk dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan perumahan yang lebih menguntungkan para pemilik modal.

Kondisi tersebut dapat diistilahkan sebagai politik rente yang sudah banyak diburu oleh pengusaha untuk menjadikan lahan pertanian (persawahan menjadi kawasan industri). Para pemilik modal atau yang dikenal sebagai pihak swasta yang sudah diberikan izin pembukaan usaha yang diajukan kepada pemerintah sehingga pihak tersebut bisa memonopoli lahan tersebut menjadi lahan industri. Berdasarkan

pernyataan di atas, maka penulis membuat makalah yang berjudul **"Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional Melalui Revitalisasi di Sektor Pertanian Dalam Rangka Mengurangi Fenomena Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Kawasan Industri".**

PERMASALAHAN

Masalah lingkungan yang dihadapi dewasa ini pada dasarnya adalah masalah ekologi manusia. Masalah itu timbul karena perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan itu kurang sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Jika hal ini tidak segera diatasi pada akhirnya berdampak kepada terganggunya kesejahteraan manusia.

Kerusakan lingkungan yang terjadi dikarenakan eksflorasi sumberdaya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan ini telah mengganggu proses alam, sehingga banyak fungsi ekologi alam terganggu. Masalah lingkungan tidak berdiri sendiri, tetapi selalu saling terkait erat. Keterkaitan antara masalah satu dengan yang lain disebabkan karena sebuah faktor merupakan sebab berbagai masalah, sebuah faktor mempunyai pengaruh yang berbeda dan interaksi antar berbagai masalah dan dampak yang ditimbulkan bersifat kumulatif (Soedradjad, 1999). Masalah lingkungan yang saling terkait erat antara lain adalah populasi manusia yang berlebih, polusi, penurunan jumlah sumberdaya, perubahan lingkungan global dan perubahan atau alih fungsi lahan terutama persawahan yang dapat menganggu ketahanan pangan masyarakat yang akhirnya dapat mengancam kesejahteraan.

Apabila lahan persawahan sudah dialihfungsikan, maka akan mempengaruhi pendapatan petani dan berdampak buruk pada ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga kemampuan untuk membeli pangan dan tidak terjadinya ketergantungan dengan pihak manapun. Ketahanan pangan nasional sangat bergantung kepada produksi beras yang seharusnya meningkat dan tidak menimbulkan kerawanan pangan. Sedangkan makanan pokok masyarakat Indonesia sangat bergantung pada beras, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh beras. Harga beras naik dan terus naik yang disebabkan oleh menurunnya produksi beras dan meningkatnya permintaan terhadap beras. Operasi pasar beras murah bulog tidak mampu menekan kebijakan harga. Nasib petani padi di Indonesia juga akan dikhawatirkan menimbulkan banyak permasalahan sosial, mereka akan menjadi pengangguran dan akan menjadi masalah sosial dan ekonomi yang berkepanjangan.

Masalah pengangguran menyebabkan banyak kelompok masyarakat petani menjadi miskin dan kekurangan pendapatan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah merupakan gabungan antara faktor internal dan eksternal. Kebijakan pembangunan yang keliru merupakan faktor eksternal. Korupsi yang menyebabkan berkurangnya alokasi anggaran untuk suatu kegiatan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat juga termasuk faktor eksternal. Sementara itu, keterbatasan wawasan, kurangnya ketrampilan, kesehatan yang buruk, serta etos kerja yang rendah, semuanya itu merupakan faktor internal. Faktor-faktor internal dapat dipicu munculnya oleh faktor-faktor eksternal juga. Kesehatan masyarakat yang buruk adalah pertanda rendahnya gizi masyarakat. Rendahnya gizi masyarakat adalah akibat dari rendahnya pendapatan dan terbatasnya sumber daya alam. Selanjutnya rendahnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) adalah akibat rendahnya pendidikan. Hal yang terakhir ini juga pada gilirannya merupakan akibat dari kurangnya pendapatan. Kurangnya pendapatan merupakan akibat langsung dari keterbatasan lapangan kerja. Dan seterusnya berputar-putar dalam proses yang saling terkait.

Mengurangi berbagai faktor penyebab kemiskinan tidak mudah dan tidak jelas harus mulai dari titik mana. Keterbatasan lapangan kerja seharusnya bisa diatasi dengan penciptaan lapangan kerja. Namun lapangan kerja bukanlah hal yang begitu dapat dilakukan, misalnya dengan meminjam dari sumber-sumber pembiayaan luar negeri. Buktinya pinjaman luar negeri Indonesia pada saat ini sudah mencapai lebih dari US$ 140 milyar, namun tetap tidak mudah bagi banyak warga negara khususnya yang tidak memiliki ketrampilan khusus, untuk mendapatkan lapangan kerja.

Upaya meningkatkan penguasaan IPTEK masyarakat juga bukan perkara mudah. Masalah utamanya adalah biaya pendidikan. Tetapi bukan hanya itu, budaya menghargai symbol-simbol formal di masyarakat Indonesia merupakan hal yang sangat menghambat kemajuan penguasaan IPTEK. Belum ada kemungkinan manusia Indonesia akan terpandang di lingkungan masyarakatnya

apabila telah memiliki ijazah kesarjanaan daripada memiliki kemampuan nyata untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Akhirnya dunia pendidikan pun tidak tergerak untuk mencetak manusia-manusia siap pakai.

Di bidang pendidikan, sejak awal masa kemerdekaan pemerintah berupaya melancarkan pemberantasan buta huruf tak terbatas di sekolah formal saja, namun juga secara non formal. Di era Bung karno, anak-anak usia sekolah bahkan dikejar agar mau masuk sekolah. Di era Pak Harto dicanangkan wajib belajar sembilan tahun, dan hasilnya luar biasa. Hal ini ditunjukkan pada peningkatan peserta pendidikan dasar dari 62 persen anak-anak pada tahun 1973 menjadi lebih dari 90 persen pada tahun 1983. Namun sampai saat ini tingkat buta huruf dilaporkan masih cukup tinggi di Indonesia, yaitu meliputi sekitar 5,9 juta orang yang berumur antara 10-44 tahun.

Di bidang kesehatan, pemerintah meluncurkan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan memperkenalkan sistem santunan sosial. Di era Orde Baru sejak sejak 1970-an dikenalkan pusat pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan (Puskesmas) agar mudah lebih terjangkau oleh masyarakat desa, kemudian dibentuk pos pelayanan terpadu (Posyandu) di setiap desa. Pada awal 1990-an pembangunan pusat kesehatan masyarakat lebih tinggi dari pada rumah sakit. Penempatan bidan di desa yang mendidik kader-kader dari kalangan penduduk desa sendiri dan medampingi kader dalam kegiatan rutin posyandu, menunjukkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Kaderisasi semacam ini meningkatkan peluang keberlanjutan program yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan. Program keluarga berencana merupakan program strategis untuk mengurangi tingkat kemiskinan keluarga.

Melalui program transmigrasi, penduduk miskin dari daerah padat diberi peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Pembukaan dan pembagian tanah pertanian baru diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja para transmigran. Selanjutnya melalui Small Enterprise Depelopment Project dari Bank Dunia dilaksanakan program kredit likuiditas Bank Indonesia berupa Kredit Investasi Kecil (KIK) dan Kredit Modal Kerja Permanen pada awal 1974 sampai awal 1990-an. Melalui paket 29 Januari 1990, pola kredit usaha kecil diwujudkan dalam KUK (Kredit Usaha Kecil) yang merupakan kredit komersial. KUK ditetapkan 20 persen dari portofolio kredit bank yang menyalurkannya. Melalui surat keputusan Menteri Keuangan No.12320/1989, BUMN diwajibkan untuk menyisihkan 1-5 persen labanya bagi pembinaan usaha kecil dan koperasi (PUKK). Fasilitas lainnya lagi adalah (Kredit Usaha Tani) yang mulai dilaksanakan tahun 1985dan merupakan bantuan modal kerja bagi petani untuk meningkatkan produktifitas dan pendapatan.

Dalam rangka menanggulangi kemiskinan, diluncurkan pula berbagai inpres, seperti Inpres Kesehatan, Inpres Perhubungan, Inpres Pasar, Bangdes, dan yang masih cukup terkenal adalah Inpres Desa Tertinggal. Kemudian program pemberdayaan lainnya seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K). Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkataan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan seterusnya.

Hampir semua departemen mempunyai mempunyai program penanggulangan kemiskinan, dan dana yang telah dikeluarkan pemerintah untuk melaksanakan program tersebut telah mencapai puluhan trilyun rupiah. Dari berbagai jenis program yang direncanakan pemerintah dari berbagai departemen ternyata masih juga perekonomian Indonesia ambruk dan tidak tahan meghadapi krisis moneter tahun mulai tahun 1997. Hal tersebut terjadi karena kurang seimbangnya perhatian yang diberikan pemerintah Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai kini pada pengembangan ekonomi kelompok usaha-usaha mikro, kecil dan menengah dibandingkan dengan kelompok usaha-usaha besar. Kelompok usaha besar ini dalam perkembangannya kurang menjalin hubungan yang sifatnya saling memperkuat dengan kelompok-kelompok usaha-usaha mikro, kecil dan menengah.

Kemudian usaha mikro, kecil dan menengah masih mampu bertahan dalam menghadapi krisis yang terjadi sampai saat ini, tetapi bagi yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali atau identik dengan pengangguran akan memiliki dampak yang besar bagi pertumbuhan ekonomi negara umumnya dan keluarga khususnya. Kemudian bila dalam keluarga hanya ada satu orang bekerja sedangkan anggota keluarganya cukup banyak jumlahnya, maka jika pendapatan dirata-ratakan untuk setiap orang anggota keluarga belum dapat memenuhi kebutuhan akan pangan yang sehat dan bergizi sehingga

untuk sekolah juga tidak bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga.

Dari masalah tersebut, peran pemerintah belum memiliki pengaruh yang berarti, karena menurut Undang-undang Dasar 1945 dikatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran atau yang tertuang dalam pasal 31 UUD 1945, kemudian warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak yang tertuang dalam pasal 27 UUD 1945. Dari segi efktifitasnya pemerintah dalam melaksanakan peraturan belum terpenuhi dengan baik. Banyak fakta di permukaan bumi ini bahwa sebuah negara yang kapabel dengan institusi pemerintah yang baik dan transparan ternyata pertumbuhan ekonomi, kesehatan masyarakatnya dan prestasi sosialnya lebih tinggi. Pendapatan, investasi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi maupun angka harapan hidup yang lebih panjang, dapat ditemukannya di negara yang efektif, jujur, dan meritokrasi dengan dengan regulasi yang jelas, aturan dan hukum yang berjalansecara adil dibandingkan dengan negara yang pemerintahannya tidak efektif, tidak jujur, sistem birokrasi yang panjang, dan aturan atau hukum yang berjalan tidak adil.

Keberhasilan suatu pemerintahan ditentukan pula oleh proses politik dalam menentukan kebijakan publik dan alokasi pengeluaran publik. Keberhasilan dalam kebijakan publik tergantung pada pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi serta adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pemerintahan yang tidak akuntabel dan korup akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi dan dan bahkan akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonominya. Fakta menunjukkan bahwa korupsi secara signifikan mengurangi investasi domestik dan asing di negara yang korup.

Di Indonesia korupsi tidak hanya terjadi karena gagalnya penegakan hukum, tetapi dalam perekrutan pegawai negeri atau penerimaan murid sekolah mulai Taman Kanak-kanak hingga ke Perguruan Tinggi sering terjadi kecurangan sebagai awal dari korupsi. Bagi mereka yang memiliki kemampuan ekonomi bersekolah di sekolah bergengsi bukan masalah bagi mereka meskipun otaknya dapat dikatakan tidak mampu, sedangkan bagi mereka yang ekonominya kurang menguntungkan bersekolah di sekolah yang tidak berkualitas meskipun dari kemampuan otaknya cukup baik. Akibatnya anak-anak yang mampu secara akademik namun tidak mampu secara ekonomis terpaksa sekolah atau kuliah di perguruan tinggi yang tidak bermutu. Contoh lain dalam dunia pendidikan yang akan merusak generasi menjadi generasi tidak jujur (koruptor) seperti promosi kepala sekolah, pemberian nilai pada murid/mahasiswa dan sebagainya yang sistemnya sungguh tidak jujur.

Dari kondisi tersebut membuat sistem pendidikan Indonesia membawa hasil yang menimbulkan berbagai fenomena, karena untuk mencetak generasi yang baik harus diawali dengan sistem yang baik pula. Menciptakan masyarakat yang kreatif, brilian, inovatif dan terampil serta memiliki keahlian bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, di samping membutuhkan waktu juga membutuhkan komitmen dan biaya yang besar dari pemerintah. Fenomena tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan baik formal maupun informal. Karena itu ada pendapat bahwa suatu wilayah atau negara yang gagal dalam pembangunannya adalah negara yang tidak menjadikan pendidikan sebagai paradigma yang akan dicapai dalam pembangunan ekonominya. Kegagalan dalam membangun pendidikan merupakan faktor penentu dari segala permasalahan pembangunan. Untuk itu agar manusia Indonesia memiliki sumber daya manusia yang baik dan berkwalitas serta inovatif, kreatif dan produktif mereka harus diberi penghargaan yang tinggi dan peluang untuk meningkatkan kemampuan terutama di bidang pendidikan sehingga bangsa kita terpuruk ke dalam jurang kehancuran baik yang bersifat fisik maupun mental. Kurangnya investasi pada sumber daya manusia merupakan penyebab lambannya permbangunan dan pertumbuhan di negara terbelakang dan berkembang. Tanpa pengembangan dan peningkatan pendidikan dan ketrampilan serta efisiensi masyarakat, maka produktifitas modal fisik akan rendah. Modal fisik menjadi lebih efektif dan efisien jika tersedia sumber daya manusia yang berkwalitas.

Memberikan pendidikan kepada kaum miskin akan memperbaiki mereka untuk membentuk kehidupan mereka, memperkuat dan memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara langsung. Dengan tingkat pendidikan yang baik akan meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menghadapi perubahan lingkungan. Dengan demikian melakukan investasi pada sumber daya manusia melalui pendidikan

merupakan hal yang krusial bagi pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat kemiskinan. Investasi pada sumber daya manusia diperlukan tidak saja untuk meningkatkan kwalitas modal sumber daya manusia yang ada, tetapi juga untuk menjaga kwalitas sumber daya manusia agar tetap berkwalitas dan makin tinggi produktifitasnya sehingga bila kwalitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan, maka masalah kemisikinan dapat berkurang.

Kemiskinan bukanlah peristiwa alam atau proses alamiah yang sekedar singgah tanpa sebab. Kemiskinan bukan juga seperti paradigma yang salah yang dikatakan banyak pejabat bahwa orang miskin tidak memiliki etos kerja yang tinggi, tidak ada kreatifitas dan jiwa kewiraswastaan. Kebanyakan masyarakat miskin berada di lingkungan pedesaan yang sebagian penduduknya bekerja sebagai petani. Petani di Indonesia banyak yang memiliki pendapatan yang rendah, karena banyak faktor yang menjadi penyebabnya yaitu dalam kepemilikan lahan petani sudah banyak lahan yang sempit, akibat alih fungsi lahan menjadi kawasan industri maupun perumahan. Produktifitas lahan juga menurun akibat intensifikasi berlebihan dan penggunaan pupuk kimia secara terus menerus yang akhirnya terjadi tidak efisien dan efektif dalam mengolah produk pertanian.

Selain itu sistem alih teknologi juga lemah, karena rendahnya pendidikan petani dan kurangnya pengetahuan petani terhadap teknologi pertanian akibatnya komoditas pertanian belum bisa diunggulkan sebagai produk komoditas yang diorientasikan pada pasar baik lokal maupun internasional. Produk yang dihasilkan hanya cukup memenuhi kebutuhan sehari-hari saja. Di sini petani juga tidak punya jiwa kewirausahaan, karena masih lemah informasi tentang pentingnya jiwa wirausaha dan kemandirian yang harus dimotivasi untuk petani.

Ternyata masih banyak masalah petani dalam memenuhi kebutuhannya bisa juga karena kasus persengketaan tanah antara perusahaan dan petani. Seperti contoh di Jambi PT WKS dengan petani yang ada di wilayah tersebut akibat pemerintah masih berpihak kepada perusahaan daripada petani (kebijakan pemerintah) yang membuat petani kehilangan lahan kepemilikan akan tanah mereka. Kemudian para petani juga tidak memiliki biaya untuk mengurus sertifikat atas tanah mereka. Hal ini harus didorong kepada petani untuk membentuk lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pertanian untuk membantu para petani yang kehilangan lahan pertanian agar dapat memperoleh hak mereka akan kepemilikan terhadap tanah yang harus mereka perjuangkan kembali.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Sahdan (2005) bahwa masyarakat yang tergolong miskin dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut yaitu: 1) kurangnya pangan, sandang, dan perumahan yang tidak layak; 2) tanah dan alat-alat produktif yang dimiliki terbatas; 3) kurangnya kemampuan membaca dan menulis; 4) kurangnya jaminan dan kesejahteraan hidup; 5) kerentanan dan keterpurukan dalam bidang sosial dan ekonomi; 6) akses terhadap ilmu pengetahuan yang terbatas. Selain itu Bappenas (dalam Sahdan, 2005) juga berpendapat bahwa yang termasuk indikator kemiskinan adalah terbatasnya kecukupan dan mutu pangan dilihat dari stock pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita, dan ibu. Masalah gizi kurang pada anak berkelanjutan pada wanita usia subur, yang akan melahirkan anak dengan risiko BBLR. Faktor penyebab dari tingginya kematian ibu, bayi dan anak ini tidak lain disebabkan karena belum memadainya pelayanan kesehatan masyarakat dan keadaan gizi, diluar faktor pencetus lainnya yang memperkuat masalah ini seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan. Akibat yang terlihat dari kemiskinan adalah masih dijumpai hampir 50% rumah tangga mengkonsumsi makanan kurang dari 70% terhadap angka kecukupan gizi yang dianjurkan (2200 Kkal/kapita/hari; 48 gram protein/kapita/hari). Kita ketahui Human Development Index pada tahun 2000 yang dilaporkan oleh UNDP adalah 109 untuk Indonesia, tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN lainnya. Masih tingginya masalah gizi, akan berpengaruh nyata terhadap tingkat pendidikan dan pendapatan per kapita. Rendahnya kondisi gizi akan berakibat pada rawannya penyakit infeksi dan semakin tinggi pengeluaran terhadap kesehatan. Krisis ekonomi yang berkepanjangan akan berdampak lebih nyata pada masalah kesehatan dan gizi penduduk. Masalah ini merupakan salah satu penyebab terjadinya kemiskinan yang berdampak kepada rendahnya kesehatan dan gizi masyarakat.

Kemudian kelaparan dan kekurangan pangan merupakan bentuk terburuk dari kemiskinan yang dihadapi rakyat, di mana kelaparan itu sendiri merupakan suatu proses

sebab akibat dari kemiskinan. Oleh Sebab itu usaha pengembangan ketahanan pangan tidak dapat dipisahkan dari usaha penanggulangan masalah kemiskinan. Dilain pihak masalah pangan yang dikaitkan dengan kemiskinan menjadi perhatian dunia, terutama seperti yang dinyatakan dalam KTT pangan dunia dan Indonesia memiliki tanggung jawab aktif memberikan kontribusi terhadap usaha menghapuskan kelaparan di dunia. Yang menyebabkan menurunnya kesejahteraan petani, karena petani memiliki keterbatasan seperti: 1)tidak memiliki faktor produktif apapun kecuali tenaga kerja; 2)luas lahan petani sempit dan mendapat tekanan untuk terus terkonversi; 3)terbatasnya akses terhadap dukungan layanan pembiayaan; 4)terbatasnya akses terhadap informasi dan teknologi yang lebih baik; 5)infrastruktur produksi (air, listrik, jalan, telekomunikasi) yang tidak memadai; 6)struktur pasar yang tidak adil dan ekspoilatif akibat posisi rebut tawar yang sangat lemah; 7)ketidakmampuan, kelemahan, atau ketidaktahuan petani sendiri (Krisnamurthi, 2003).

Dari pendapat tersebut bahwa tanpa penyelesaian yang mendasar dan komprehensif dalam berbagai aspek di atas kesejahteraan petani akan terancam dan ketahanan pangan akan sulit dicapai. Kemudian akan muncul sebuah kegagalan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Sektor pertanian merupakan kunci keberhasilan pembangunan, karena sector jasa dan industri tidak akan berjalan jika tidak ditopangi dengan sector pertanian dan sector pertanian yang dapat mengurangi angka kemiskinan (Aziz, 2010). Kemudian menurut Mellor (dalam Amir, 2007) kegagalan dalam mengatasi kemiskinan disebabkan oleh empat permasalahan yang saling berkaikan; yaitu: 1)penyediaan pangan tidak dapat meningkat secara berarti sehingga gizi dan kesejahteraan kaum miskin tidak dapat ditingkatkan; 2)pertumbuhan kesempatan kerja sangat rendah dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan penduduk sehingga kaum miskin tidak memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasr mereka; 3)pertumbuhan jasa dasar (publik) lebih banyak di perkotaan sehingga masyarakat desa tidak dapat menggunakannya tetapi untuk menggunakannnya membutuhkan biaya yang tinggi; 4)pertumbuhan ekonomi yang rendah dan cenderung berfluktuatif. Untuk mengatasi kemiskinan dan memberikan kesempatan kerja pada kaum miskin, maka strategi pembangunan harus didasarkan pada sektor pertanian dan kesempatan kerja.

Jadi sektor tersebut benar-benar diperhatikan oleh pemerintah dengan penuh kebijakan yang bertanggung jawab dan tidak memihak kepada pihak yang memiliki modal besar seperti contoh sumbangan pajaknya besar sehingga terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan akibat menjadikan lahan pertanian menjadi kawasan indutri seperti industri perumahan dan sebagainya yang tidak mendukung keberadaan petani sebagai faktor penunjang pertumbuhan ekonomi sehingga pemerintah gagal dalam membantu petani meningkatkan kesejahteraan sebagai penduduk atau masyarakat yang tingkatan hidupnya di negara Indonesia merupakan kategori penduduk yang berada pada lapisan menengah ke bawah.

PEMBAHASAN

Jumlah pengangguran dan kemiskinan di Indonesia akan terus bertambah jika pemerintah gagal melaksanakan program pembangunan yang berbasis pada program padat karya terutama di sektor pertanian. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah saat ini lebih berorientasi pada pasar bebas yang hanya menguntungkan kepada kelompok elite tertentu sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan kian bertambah. Modal dalam negeri tidak tidak diorientasikan pada sektor rill, tetapi justru digunakan untuk membeli Sertifikat Bank Indonesia dan obligasi pemerintah.

Sementara para investor asing juga melakukan permainan investasi yang sama di bidang saham dan obligasi. Keuntungan dari membeli saham dan obligasi di pasar sekunder atau bursa, oleh investor asing kemudian dibelikan lagi saham saham perusahaan seperti PT Telkom, sektor perbankan dan perkebunan. Sampai saat ini pengusaha masih dibebani oleh ekonomi berbiaya tinggi yang muncul akibat birokrasi berbelit, korupsi dan tidak transparannyan pelayanan publik. Keadaan seperti ini akan memperlambat pertumbuhan ekonomi sehingga jumlah kemiskinan dan jumlah pengangguran semakin bertambah banyak. Adapun sistem pembangunan yang dijalankan pemerintah saat ini lebih cenderung memihak kepada kelompok pengusaha besar tertentu.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa di negara berkembang untuk memperoleh pendidikan begitu mahal, padahal jika ditafsirkan apabila pendidikan mahal dan sangat tinggi biayanya maka lembaga pendidikan tersebut memiliki

kwalitas pula. Tetapi kenyataannya tidak, karena Indonesia merupakan negara yang terus mengalami inflasi akibat sistem perekonomian terutama yang menyebabkan terjadi kenaikan harga secara terus menerus baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan lainnya.

Dalam hal ini program pemberdayaan seperti Program Pembinaan dan Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K). Program Tabungan dan Kredit Usaha Kesejahteraan Rakyat (Takesra-Kukesra), Program Pengembangan Kecamatan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkataan (P2KP), Program Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT) dan seterusnya dapat membantu mengurangi masyarakat miskin. Masyarakat seperti ini banyak terdapat atau bermukim di desa-desa yang jauh dari sentuhan tangan pemerintah. Apabila program ini tidak dijalani dengan benar dan jujur akibatnya banyak petani yang tidak mampu meningkatkan pendapatan mereka, apalagi untuk membiayai pendidikan anak-anaknya yang semakin mahal dan tidak terjangkau.

Di negara berkembang, sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi negara, menjadi penyedia sektor lapangan pekerjaan yang besar dan pendukung bagi pengembangan sektor lainnya. Tapi kenyataanya sektor pertanian di negara berkembang belum menjadi leading sektor di negara tersebut bahkan dipandang sebelah mata oleh pemimpin negara sehingga banyak kebutuhan pokok di bidang pertanian masih diimpor dari luar padahal kita merupakan negara agraris. Sektor industri dan jasa yang dianggap sebagai pemimpin sektor, pertanian hanya pelengkap saja sehingga akan berdampak pada ketahanan pangan nasional bukan hanya petani saja, hal ini perlu perhatian dari pemerintah dengan membuat komitmen dan kerjasama yang erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti dipresentasikan oleh kalangan LSM dan perguruan tinggi. Dalam hal ini dewan ketahanan pangan yang didirikan dari sisi pemerintah perlu diperkuat dan dilengkapi dengan forum atau lembaga lain yang mampu menampung partisipasi swasta, LSM, dan perguruan tinggi.

Kemudian terus memberikan masukan bagi pelaksanaan pangan nasional yang sesuai dengan tujuan ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Bersama pemerintah dan swasta melakukan berbagai usaha untuk menghadapi tekanan dan dampak negatif. Agar sektor pertanian dapat dijadikan sebagai leading sektor, maka perlu dilakukan globalisasi dan perdagangan pangan internasional, kemudian mengusulkan kepada pemerintah dan swasta agar dapat memfokuskan diri pada pelaksanaan agenda pengembangan ketahanan pangan sebagai berikut:1)mencegah dan mengurangi laju konversi lahan produktif; 2)memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai bentuk sumber daya lahan (lahan kering, lahan rawa, lahan pasang surut) untuk kepentingan pemantapan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani; 3)mendukung usaha peningkatan produktifitas pertanian terutama melalui peningkatan penggunaan bibit unggul dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen; 4)melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan optimasi pemanfaataan infrastruktur irigasi dan jalan desa; 5)melakukan langkah kongkrit dalam konservasi sumber daya tanah dan air terutama dalam wilayah aliran sungai; 6)mempromosikan produksi dan konsumsi aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal, baik yang berbasis tanah, maupun berbasis air (laut, danau, sungai) dengan menyertakan masyarakat dan dunia usaha; 7) mengembangkan sistem informasi pangan yang dapat diakses secara terbuka termasuk pengembangan peta potensi pangan di kelembagaan pendukung produksi dan distribusi pangan terutama kelembagaan pembiayaan, penelitian, penyuluhan dan pendidikan; 8)mengembangkan berbagai sistem insentif yang diperlukan bagi peningkatan produksi pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan sehingga sektor pertanian bisa meningkat.

Upaya agar pertanian dapat ditingkatkan perannya dalam perekonomian dengan melakukan revitalisasi pertanian yang meliputi kegiatan: (1)Mensinergikan pembangunan sektor pertanian; (2)Penyegaran kembali vitalitas pertanian; (3)Memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan; (4)Menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholders untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian; (5)Mengubah paradigma pola pikir masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian; (6)Peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi, produktifitas dan daya saing komoditas pertanian.

Upaya revitalisasi tersebut dilakukan karena ketidakberdayaan petani dan nelayan dalam melaksanakan kegiatan pertaniannya yang disebabkan karena kegagalan pada pasar produk

yang ciri-cirinya banyak petani yang gagal dalam kompetisi sehingga kalah saing di pasaran produk, kemudian pasar produk yang bersifat inelastis. Ketinggalan informasi bagi petani dalam hal harga yang berlaku di pasar.

Selain itu karena keterbatasan jumlah institusi dan sumber daya manusia di bidang pertanian di desa yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah sehingga harus memadai fasilitas pertanian terutama sumber daya manusia yang bergerak di bidang pertanian baik petani itu sendiri, petugas pertanian dan pemerintah terutama yang bergerak di sektor pertanian seperti dinas pertanian. Kepala dinas pertanian haruslah orang yang berlatar belakang pendidikan di bidang pertanian. Agar upaya revitalisasi pertanian dapat berjalan dengan baik maka semua unsur yang terlibat di sektor pertanian mulai dari petani, pengusaha, industriawan dan perguruan tinggi diharapkan menjadi partner institusi di daerah baik dalam konsep aktifitas maupun dalam menjembatani kepentingan petani.

Dengan demikian petani dan nelayan yang tidak berdaya baik dalam kwalitas maupun produktifitas dapat ditingkatkan. Khusus perguruan tinggi yang memiliki pertanian dan teknologi yang lebih baik diharapkan lebih dominan dalam meningkatkan kwalitas dan produktifitas petani dengan cara mentransfer pengetahuannya kepada petani dan nelayan. Sedangkan pembiayaan untuk melakukan transfer pengetahuan tersebut diharapkan disediakan oleh pemerintah. Dengan kerjasama tersebut maka upaya revitalisasi pertanian dapat dicapai dengan baik.

Kemudian mendorong peran lembaga keuangan (bank dan non-bank) untuk masuk ke sektor pertanian dengan skema yang menguntungkan petani, mendorong penguatan modal kolektif petani, mendorong peran tengkulak untuk membangun kemitraan yang adil dan peduli petani, merealisasikan subsidi pertanian yang tepat sasaran dan bersifat produktif, mendorong gerakan pertanian dan teknologi pertanian yang ramah lingkungan, ciptakan pasar alternative dengan rantai tata niaga pendek (direct marketing), mendorong terwujudnya organisasi tani yang kuat dan berakar, meningkatkan layanan informasi bagi petani, mendorong motivasi petani untuk menggali dan menguasasi info serta mengkaji ulang kebijakan pemerintah di sektor pertanian.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar masyarakat berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan antara lain:

1. tingkat pendidikan.
2. Peningkatan penghasilan.
3. Pengetahuan tentang kearifan lokal.
4. Penerapan sistem pertanian konservasi (terasering, rorak – tanah yang digali dengan ukuran tertentu yang berfungsi menahan laju aliran permukaan–, tanaman penutup tanah, pergiliran tanaman, agroforestry, olah tanam konservasi – pengolahan yang tidak menimbulkan erosi.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kemisikinan telah membatasi hak rakyat untuk (1) memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan; (2) hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum; (3) Hak rakyat untuk memperoleh rasa aman; (3) Hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau; (5) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pendidikan; (6) hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan kesehatan; (7) hak rakyat untuk memperoleh keadilan; (8) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan; (9) hak rakyat untuk berinovasi; (10) hak rakyat untuk menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan dan (11) hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.
2. Keberhasilan suatu pemerintahan ditentukan pula oleh proses politik dalam menentukan kebijakan publik dan alokasi pengeluaran publik. Keberhasilan dalam kebijakan publik tergantung pada pemerintahan yang akuntabel, pemerintahan yang transparan, pemerintahan yang bersih dan tidak korupsi serta adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Pemerintahan yang tidak akuntabel dan korup akan memperlambat tingkat pertumbuhan ekonomi dan bahkan akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi dan bahkan akan mengurangi tingkat pertumbuhan ekonominya. Fakta menunjukkan bahwa korupsi secara signifikan mengurangi investasi domestik dan asing di negara yang korup.
3. Di negara berkembang, sektor pertanian merupakan sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi negara, menjadi penyedia sektor lapangan pekerjaan yang besar dan pendukung bagi pengembangan sektor lainnya. Tapi kenyataanya sektor

pertanian di negara berkembang belum menjadi leading sektor di negara tersebut bahkan dipandang sebelah mata oleh pemimpin negara sehingga banyak kebutuhan pokok di bidang pertanian masih diimpor dari luar padahal kita merupakan negara agraris. Sektor industri dan jasa yang dianggap sebagai pemimpin sektor, pertanian hanya pelengkap saja.

4. Agar sektor pertanian dapat dijadikan sebagai leading sektor, maka perlu dilakukan globalisasi dan perdagangan pangan internasional, kemudian mengusulkan kepada pemerintah dan swasta agar dapat memfokuskan diri pada pelaksanaan agenda pengembangan ketahanan pangan sebagai berikut:1)mencegah dan mengurangi laju konversi lahan produktif; 2)memanfaatkan dengan lebih optimal berbagai bentuk sumber daya lahan (lahan kering, lahan rawa, lahan pasang surut) untuk kepentingan pemantapan produksi pangan dan peningkatan pendapatan petani; 3)mendukung usaha peningkatan produktifitas pertanian terutama melalui peningkatan penggunaan bibit unggul dan mengurangi kehilangan hasil pasca panen; 4)melakukan rehabilitasi, pemeliharaan dan optimasi pemanfaataan infrastruktur irigasi dan jalan desa; 5)melakukan langkah kongkrit dalam konservasi sumber daya tanah dan air terutama dalam wilayah aliran sungai; 6)mempromosikan produksi dan konsumsi aneka ragam pangan berbasis sumber daya lokal, baik yang berbasis tanah, maupun berbasis air (laut, danau, sungai) dengan menyertakan masyarakat dan dunia usaha; 7) mengembangkan sistem informasi pangan yang dapat diakses secara terbuka termasuk pengembangan peta potensi pangan di kelembagaan pendukung produksi dan distribusi pangan terutama kelembagaan pembiayaan, penelitian, penyuluhan dan pendidikan; 8)mengembangkan berbagai sistem insentif yang diperlukan bagi peningkatan produksi pangan dan peningkatan pola konsumsi pangan sehingga sektor pertanian bisa meningkat.
5. Sektor pertanian dapat dijadikan sebagai leading sektor, maka perlu dilakukan supaya agar pertanian dapat ditingkatkan perannya dalam perekonomian dengan melakukan revitalisasi pertanian yang meliputi kegiatan: (1) mensinergikan pembangunan sektor pertanian, penyegaran kembali vitalitas pertanian; (2) memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan; (3) menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholders untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian; (4) mengubah paradigma pola pikir masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian; (5) penyegaran kembali vitalitas pertanian; (6) memberdayakan kemampuan dan meningkatkan kinerja sektor pertanian dalam pembangunan; (7) menggalang komitmen dan kerja sama seluruh stakeholders untuk meningkatkan peran sektor pertanian dalam perekonomian; (8) mengubah paradigma pola pikir masyarakat dalam melakukan kegiatan pertanian; (9) peningkatan kesejahteraan petani melalui peningkatan produksi; (10) produktifitas dan daya saing komoditas pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim, *Undang-undang Dasar Tahun 1945*. Tahun 1996. Penerbit Grafindo Jakarta.

Amri Amir, *Pembangunan dan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi dalam Era Globalsisasi*, tahun 2007. Penerbit Biografika Bogor.

Anonimus. 2004. Profil Kehutanan Kabupaten Lebong. Dinas Kehutanan Lebong.

Bayu Krisnamurthi, *Agenda Pemberdayaan Petani dalam Rangka Pemantapan Ketahanan Pangan Nasional*, Oktober 2003.Sumber:http/www.google.co.id/gwt/artikel.

Dalle Daniel, *Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah* April 2003. Sumber: http://www.google.co.id/gwt/ekonomirakyat.

Gregorius Sahdan, *Menanggulangi Kemiskinan Desa* Jurnal ekonomi rakyat Maret 2005. Sumber: http://www.google.co.id/gwt/kemiskinan&resnum..

Hari Azhar Aziz, *Jurnal Ekonomi Rakyat* Juli 2010. Sumber:http/www.google.co.id/gwt/ekonomirakyat

Soedradjat, R. 1999. *Lingkungan Hidup, Suatu Pengantar*. Dikti, P & K. Jakarta.